



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Kamis, 21 Desember 2017

Pertanyakan DD-ADD Urimessing, Jaksa Kembali Surati Inspektorat

Ambon - Kejari Ambon kembali melayangkan surat kepada Kepala Inspektorat Kota Ambon, Pieter Ohman untuk mempertanyakan hasil pemeriksaan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, tahun 2016.

Surat yang dilayangkan pekan lalu itu, ditandatangani oleh Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat.

“Kita sudah melayangkan surat ke Inspektorat untuk mempertanyakan hasil pemeriksaan penggunaan ADD dan DD Urimessing tahun 2016,” kata Robert Ilat, saat dikonfirmasi *Siwalima*, di Kantor Kejari Ambon, Rabu (20/12).

Sebelumnya Kejari Ambon telah mengirim surat Nomor : R-331/S.1.10/Fd/1/09/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, perihal permintaan pemeriksaan terhadap penggunaan ADD dan DD Urimessing tahun 2016.

“Kita sudah menyurat Inspektorat sejak 10 Oktober 2017 lalu untuk meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan, namun sudah dua bulan lebih belum juga disampaikan hasilnya, sehingga kita menyurati lagi untuk mempertanyakan hasilnya,” jelas Ilat.

Ia berharap Inspektorat mendukung langkah Kejari Ambon untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi DD dan ADD Urimessing.

“Kasus ini sudah di tahap penyelidikan sehingga kita membutuhkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat, apakah ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran ataukah tidak, sehingga kita minta agar Inspektorat dapat mendukung kerja kita,” ujarnya.

Menghindar

Kepala Inspektorat Kota Ambon, Pieter Ohman yang berupaya dikonfirmasi *Siwalima*, terkesan menghindar.

Saat ditemui usai pembukaan Musrembang di Hotel Marina, Kamis (30/11), lalu, Ohman tak mau berkomentar saat ditanyakan soal permintaan Kejari Ambon. “Nanti saja, ya,” tandasnya.

Saat ke kantornya, Ohman tidak berada di tempat. Kalaupun ada, ia tidak mau ditemui. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya, tidak mau diangkat. SMS yang dikirimpun juga tidak direspons.

Kasi Pidsus Kejari Ambon, Irwan Somba mengatakan, pihaknya akan tetap menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

“Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan ada pada Aparatur Internal Pengawasan Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan, jika ditemukan kesalahan administrasi maka akan diselesaikan secara internal namun jika ditemukan adanya indikasi pidana maka Inspektorat harus menyampaikan hasilnya kepada penyidik, sehingga kami akan tetap menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat,” tegasnya, kepada *Siwalima*, di Kantor Kejari Ambon, Selasa (5/12).

Selain itu, kata dia, pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Dalam Perpres itu dijelaskan, salah satu peran Inspektorat atau disebut Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara yaitu melalui review atas laporan keuangan pemerintah.

Bakal Naik Penyidikan

Status kasus dugaan korupsi Alokasi ADD dan DD Urimessing, tahun 2016 bakal naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Jaksa telah megantongi bukti-bukti kuat dugaan korupsi dalam pengelolaan dana ratusan juta rupiah itu.

Bukti-bukti digarap dari pemeriksaan saksi-saksi maupun lainnya. Ekspos segera digelar untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, kita temukan adanya dugaan korupsi sehingga dalam waktu dekat akan diekspos untuk ditingkatkan ke penyidikan,” kata Kasi Pidsus Kejari Ambon, Irwan Somba, kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Senin (25/9).

Disinggung soal Penjabat Desa Urimessing, Alfian Lewenussa yang belum pernah diperiksa, Somba mengatakan, sudah dipanggil, namun ia selalu beralasan sementara menemani Walikota, Richard Louhenapessy ke luar daerah.

“Nanti saja kita periksa yang bersangkutan di penyidikan, karena kita sudah berupaya untuk memanggil yang bersangkutan, tetapi selalu saja beralasan ke luar daerah bersama Walikota,” tandasnya. **(S-16)**

http://www.siwalimanews.com/post/jaksa_kembali_surati_inspektorat